



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

---

---

## PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang, maka perlu memberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan kepada Para Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);  
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1985 tentang Besarnya Prosentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan;

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan .....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 26/E1);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH DI KABUPATEN SAMPANG.

Pasal 1

Memberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sebelum dan/atau sama dengan jatuh tempo tanggal 30 September kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah yang telah mencapai target atas rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sampang.

Pasal 2

Besarnya pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :

a. bagi Kecamatan yang wilayah kerjanya berhasil atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo tanggal 30 September adalah sebagai berikut :

1. rangking I (pertama) sebesar Rp.3.500.000,00
2. rangking II (kedua) sebesar Rp.3.000.000,00
3. rangking III (ketiga) sebesar Rp.2.500.000,00
4. rangking IV (keempat) sebesar Rp.2.000.000,00
5. rangking V (kelima) sebesar Rp.1.500.000,00
6. rangking VI (keenam) sampai dengan XIV (keempat belas) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00.

b. bagi Desa/Kelurahan yang berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan hadiahnya adalah sebagai berikut :

1. Pokok PBB sampai dengan Rp. 1.000.000,00 adalah Rp.250.000,00
2. Pokok PBB 1.000.001,00 s/d Rp. 5.000.000,00 adalah Rp.300.000,00
3. Pokok PBB 5.000.001,00 s/d Rp.10.000.000,00 adalah Rp.400.000,00

4. Pokok PBB 10.000.001,00	s/d	Rp.15.000.000,00	adalah	Rp.500.000,00
5. Pokok PBB 15.000.001,00	s/d	Rp.20.000.000,00	adalah	Rp.600.000,00
6. Pokok PBB 20.000.001,00	s/d	Rp.25.000.000,00	adalah	Rp.700.000,00
7. Pokok PBB 25.000.001,00	s/d	Rp.30.000.000,00	adalah	Rp.800.000,00
8. Pokok PBB lebih besar dari		Rp.30.000.000,00	adalah	Rp.900.000,00

### Pasal 3

Pemberian Piagam Penghargaan dan Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan 1 (satu) bulan berikutnya dari bulan pelunasan.

### Pasal 4

Pemberian Piagam Penghargaan dan Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang, Belanja Tidak Langsung, Nomor Rekening 5.1.1.04.01 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Hadiah Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan/Perkotaan Kepada Para Camat dan Kepala Desa/Lurah Yang Berhasil Melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sampang Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 .....

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 7 Juli 2010

BUPATI SAMPANG,

NOER TIAHJA

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 7 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 17